

Analisis Sistem Pemerintahan Sultan Hasanuddin Dalam Perspektif Collaborative Governance

Andi Mallarangen

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: lerankblackajang@gmail.com

Abstract

This research aims to understand Sultan Hasanuddin's policies in establishing collaboration and diplomacy during his rule in the Kingdom of Gowa. The research employs a qualitative research method, specifically literature review, by collecting data from relevant books, journals, and theses related to the topic under investigation. The findings of the research indicate that through collaboration and diplomacy, Sultan Hasanuddin successfully forged strong relations with neighboring kingdoms and countries, particularly in the context of free trade in maritime activities. The collaborative governance approach implemented by Sultan Hasanuddin reflects a strong commitment to cross-sector cooperation, involving various stakeholders, including the government and the community.

Keywords: *Analysis, collaboration, diplomacy, Kingdom, Sultan Hasanuddin, Maritime, Collaborative Governance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Sultan Hasanuddin dalam menjalin kolaborasi dan diplomasi ketika memerintah Kerajaan Gowa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Melalui hasil dari kolaborasi dan diplomasi, Sultan Hasanuddin berhasil membangun hubungan yang erat dengan kerajaan dan negara tetangga terkait perdagangan laut bebas. Pendekatan collaborative governance yang diterapkan oleh Sultan Hasanuddin mencerminkan komitmen kuat terhadap kerjasama lintas sektor, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: *Analisis, Kolaborasi, Diplomasi, Kerajaan, Sultan Hasanuddin, Maritim, Collaborative Governance*

PENDAHULUAN

Menurut Miriam Budiardjo (2003) Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan sebuah komunitas yang dibentuk untuk sebuah kebaikan. Negara merupakan sekumpulan wilayah yang mempunyai sistem dan aturan yang berlaku bagi semua masyarakat di wilayah tersebut. Sebuah Negara tidak dapat hadir begitu saja, negara lahir dari proses yang panjang. Negara meliputi kekuasaan, pengambilan keputusan,

kebijakan umum, dan pembagaian atau alokasi. Pariwisata merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Dari hasil pariwisata di Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pendapatan pajak Negara Indonesia. Pariwisata suatu wilayah dapat menjadi ciri khas atau karakter suatu wilayah yang membuatnya berbeda dengan daerah lainnya.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan sejarah dan budaya, telah melalui berbagai fase perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu elemen kunci dalam sejarahnya adalah peran kerajaan, yang

memiliki dampak signifikan dalam membentuk identitas dan dinamika masyarakat. Periode kejayaan kerajaan di Indonesia mencakup rentang waktu yang luas, mulai dari masa kuno hingga masa penjajahan, yang menampilkan ragam kerajaan dengan kekayaan warisan budaya dan sistem pemerintahan yang beragam.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai entitas politik, tetapi juga menjadi penjaga dan pembawa nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta pusat perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Peran kerajaan ini memberikan warna tersendiri dalam kesejarahan Indonesia, memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika masyarakat, kebijakan ekonomi, dan relasi antarbangsa.

Kerajaan di Indonesia memiliki peran sentral dalam sejarah dan perkembangan masyarakatnya. Sebagai entitas politik dan sosial, kerajaan bukan hanya merupakan pilar pemerintahan, tetapi juga membawa dampak dalam membentuk kebijakan, memelihara budaya, dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks kekinian, peran kerajaan di Indonesia juga dapat dilihat dari perspektif teori collaborative governance.

Sebelum Negara Indonesia merdeka banyak daerah yang menerapkan bentuk pemerintahan monarki. Salah satunya adalah Kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa terletak di daerah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowa merupakan kerajaan yang bercorak kerajaan Islam. Pentingnya memahami warisan kerajaan di Indonesia tidak hanya terletak pada pemahaman sejarah, tetapi juga relevan dengan kondisi dan tantangan zaman modern.

Pergeseran paradigma pemerintahan menuju tatanan yang lebih inklusif dan partisipatif, dikenal sebagai collaborative governance, menjadi sebuah tren global. Collaborative governance menekankan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan

keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan.

Kemunculan Gowa sebagai kekuatan politik sudah mulai dirintis pada awal Abad XVI sejak pemerintahan Raja Gowa IX, *Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tu Maparisi Kallonna* (1510-1546). Pada masa raja Gowa kesembilan, Kerajaan Gowa dijadikan sebagai pemegang kendali politik dan kegiatan pelayaran dan perdagangan di Sulawesi Selatan, pada masa itu pelabuhan singgah Makassar mulai dikembangkan sebagai pelabuhan niaga. Letaknya sangat strategis sehingga merupakan pelabuhan yang baik dan aman. Keberhasilan raja Gowa dalam mengembangkan pelabuhan Makassar, membuat para pedagang banyak yang datang ke Makassar.

Perkembangan ini dimungkinkan karena bandar niaga di Malaka telah jatuh ke tangan Portugis dalam tahun 1511 (Kila, 2004), sehingga pedagang dari Melayu banyak yang menggunakan pelabuhan Makassar sebagai rute baru dalam perdagangan maritim. Pada zaman kekuasaan Raja Gowa IX, *Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tu-Maparisi Kallonna*, tercapai banyak kemajuan dalam lapangan politik, ekonomi dan kekuatan peperangan, termasuk pendirian benteng-benteng pertahanan di Pantai Makassar (Bahri, 2016).

Somba Opu yang menjadi ibukota kerajaan, terletak di muara sungai Jeneberang dan berhadapan langsung dengan laut. Pulau-pulau kecil mengelilingi Somba Opu dapat berfungsi sebagai tanggul untuk menahan ombak, sehingga memenuhi persyaratan untuk berlabuh bagi perahu layar dan kapal-kapal besar. Dengan pindahnya pusat kerajaan ke pinggir pantai, maka Tumapa'risi Kallonna mudah mengembangkan dan mengontrol jalannya perdagangan.

Perpindahan ibu kota ke Somba Opu berakibat pada struktur pemerintahan di Kerajaan Gowa. Secara politik, raja mengangkat seorang syahbandar sebagai

pengontrol perdagangan maritim. Ia mengatur semua pedagang yang datang dan pergi di Bandar Makassar. Pedagang yang datang dan berdagang di Makassar dari berbagai daerah di Nusantara dan Asia.

Terletak di antara Jawa dan Maluku, kerajaan Makassar dan Gowa menduduki posisi yang secara strategis sangat menguntungkan. Setelah raja masuk Islam pada 1605, kekuatannya pun mulai menyebar ke daerah-daerah lain di semenanjung Sulawesi bagian barat daya, pantai timur Kalimantan dan sebagian Kepulauan Sunda Kecil, khususnya di pulau Sumba dan Sumbawa. Raja-rajanya memaksa penguasa Buton (lepas pantai Sulawesi bagian tenggara) untuk mengalihkan pengakuan kedaulatannya dari Ternate ke Gowa. Portugis, yang terusir dari sebagian besar Maluku, menjadikan Makassar kantor pusat mereka untuk perdagangan rempah.

Pada abad ke tujuh belas, Makasar sudah merupakan bandar dan pelabuhan yang ramai di Indonesia bagian timur, kota ini sangat penting artinya terutama dalam perdagangan hasil bumi yang pada waktu itu sangat digemari dan sangat dibutuhkan oleh dunia. Letaknya sangat strategis dan baik sekali ditengah-tengah lalu lintas perdagangan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Tidaklah mengherankan jika kerajaan Gowa mendapat perhatian yang besar sekali dari orang-orang asing. Orang-orang Eropa seperti orang Portugis, orang Spanyol, orang Inggris, dan juga orang Belanda yang berusaha mencari hubungan dan ingin bersahabat dengan raja Gowa.

Keramaian Bandar Makassar mencapai puncak kejayaan pada pertengahan abad XVII M ketika Bandar Makassar menjadi Bandar internasional dan entrepot (pos perdagangan). Barang dagangan yang berasal dari timur dan barat Nusantara merupakan barang dagangan yang harus melalui Bandar Makassar. Saat itu, Makassar memiliki jalur

hubungan pelayaran dengan beberapa daerah di Nusantara dan Eropa. Mereka yang memasuki daerah Makassar diterima dengan perjanjian yang menawarkan keamanan dan persahabatan antara raja dan pedagang. Bentuk perjanjian itu diwujudkan dengan pertukaran barang dagangan dengan sistem barter dan pertalian perkawinan. Wilayah ini berhasil dieksplorasi dengan baik sebagai pelabuhan perdagangan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 dan mengambil fokus di Kabupaten Gowa sebagai tempat Kerajaan Gowa dahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur

Penelitian ini mengumpulkan data-data yang bersumber dari literatur baik itu buku, jurnal, dan skripsi yang terkait. Kemudian data yang terkumpul dianalisis yang dapat dilakukan yaitu reduksi data (penyaringan/pemilahaan data), display data (penyajian data), verifikasi data (pengujian keabsahan/kebenaran data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal (Starting Condition)

Sebagai kerajaan maritim, Gowa memiliki 14 benteng pertahanan tepi laut, yaitu: Benteng Tallo, Ana Tallo, Ujung Tana, Patunuang, Ujung Pandang, Bariboso, Mariso, Pannakukang, Garassi, Galesong, Sanrobone, Barombong, Bonto Rannu dan Kalegowa. Seluruh benteng tersebut didirikan untuk mengelilingi benteng utama, yaitu Benteng Somba Opu sebagai pusat pemerintahan dan kediaman Raja Gowa (Sudarwani, Eni, & Sir, 2020).

Benteng Somba Opu, sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Gowa pada saat itu, memiliki lokasi yang sangat strategis dan potensi alam yang menguntungkan. Benteng

tersebut terletak di tepi pantai Ujung Pandang (Makassar) dengan posisi yang menghadap langsung ke Selat Makassar dan diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Jeneberang dan Balla Berung. Seluruh lanskap alam tersebutlah yang menjadi potensi besar bagi Somba Opu untuk menjadi kota pelabuhan dan dermaga yang ramai dikunjungi oleh para pedagang asing pada masa lampau. Somba Opu berada di tengah-tengah Nusantara dan menjadi titik temu antara belahan dunia barat (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaka, Asia Selatan dan Eropa), wilayah Timur (Maluku dan Papua), Utara (Cina, Jepang, dan Filipina), serta di Selatan (Australia dan Nusa Tenggara) membuat Somba Opu memiliki posisi yang sangat penting dalam aktivitas perdagangan rempah dunia sejak abad ke-16 hingga 17. (Hildayanti, 2017; Marihandono, 2008; Muhaeminah, 2016; Nur, Purwanto, & Suryo, 2016; Sudarwani et al., 2020) Makassar mampu menjadi pasar produk dan bandar niaga dalam aktivitas

pelayaran dan perdagangan. Bahkan, para pedagang dan pelaut dari Bugis, Wajo, Selayar, Mandar, Melayu, serta berbagai bangsa asing seperti Spanyol, Inggris, Portugis dan Cina menjadikan Makassar sebagai bandar utama mereka dalam menjalin hubungan dagang dengan daerah produksi dan bandar niaga lainnya di Timur Nusantara (Bakhtiar, 2019; Sritimuryati, 2018).

Somba Opu pada saat itu menjadi tempat pengumpulan barang-barang komoditas perdagangan yang akan dikirim ke Eropa oleh para pedagang Melayu di Malaka. Komoditas tersebut berupa beras, jagung, rempah-rempah, kopra, kopi, kain tenun, kayu cendana, ternak, dan budak (Kila, 2020; Nur et al., 2016).

Makassar yang menjadi bandar transito bagi para pedagang dari berbagai daerah di Asia dan Eropa, mengambil kesempatan dengan menjalin hubungan dagang dengan mereka. Makassar menetapkan *mare liberium* (perdagangan bebas) bagi para pedagang yang

mengunjungi Makassar. Dengan kata lain, Makassar melakukan hubungan perdagangan multilateral yang berbasis maritim. Hubungan ini terus berlanjut hingga Makassar mengalami kehancuran di abad XVII.

Bandar Makassar tumbuh dan maju pesat dalam dunia perdagangan, menjadi pusat tujuan niaga bagi semua pedagang yang bergiat dalam dunia perdagangan maritim di kawasan kepulauan Indonesia. Pedagang Eropa dan Timur Asing lainnya yang datang berniaga dan menetap di bandar itu merasakan keamanan mereka terlindung dan penuh kedamaian. Politik pintu terbuka yang dijalankan oleh Kerajaan Makassar bukan hanya diarahkan untuk memikat pedagang dan pelaut di daerah sekitar (Bugis, Makassar, Mandar, Selayar, dan Bajo) atau Portugis di Malaka dan Melayu, tetapi juga bagi para pedagang dari Asia Timur dan Asia Tenggara.

Letak Makassar telah memberikan kedudukan sangat penting dalam percaturan ekonomi politik dan sosial, dalam kaitannya dengan kontak dan jalinan hubungan antara pemerintahan lokal dan penetrasi Barat. Hal itu menempatkan perdagangan sebagai kebutuhan dasar dalam membangun perekonomiannya. Kenyataan itu mendorong Kerajaan Makassar sebagai suatu kerajaan maritim untuk tampil dan berhasil membentuk satu zona perdagangan pada abad ke-16 yang oleh Kenneth Hall disebut sebagai 'jaringan Laut Jawa' yang meliputi Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Pesisir Barat Kalimantan, Jawa dan Sumatera Selatan.

Para pedagang yang menyandarkan kapal di Makassar mendapatkan kebebasan dan keamanan untuk berdagang. Tindakan monopoli perdagangan dilarang sehingga para pedagang dapat memperoleh kebutuhan yang mereka cari di Makassar. Mereka membeli rempah-rempah dan barang dagangan yang dapat ditukarkan dan kemudian dijual kembali. Dengan perkembangan pelabuhan

seperti itu datanglah mengalir barang-barang ke Makassar.

Pada abad XV M, Somba Opu menjadi bandar niaga Kerajaan Makassar yang terletak di muara sungai Jeneberang dan berhadapan langsung dengan laut. Pulau-pulau kecil mengelilingi Somba Opu dapat berfungsi sebagai tanggul untuk menahan ombak, sehingga memenuhi persyaratan untuk berlabuh bagi perahu layar dan kapalkapal besar. Dengan pindahnya pusat kerajaan ke pinggir pantai, maka Tumapa'risi Kallonna mudah mengembangkan dan mengontrol jalannya perdagangan di Makassar.

Perpindahan ibu kota ke Somba Opu berakibat pada struktur pemerintahan di Istana Makassar. Secara politik, sultan mengangkat seorang syahbandar sebagai pengontrol perdagangan maritim di Makassar. Ia mengatur semua pedagang yang datang dan pergi di Bandar Makassar. Pedagang yang datang dan berdagang di Makassar dari berbagai daerah di Nusantara dan Asia. Di masa Sultan Alauddin (1593- 1639), Malik as-Said (1639-1653), para pelaut dari Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dengan harga yang murah, kemudian dijual kembali di Bandar Makassar dengan harga yang bervariasi. Penjualan tersebut ternyata menarik perhatian dari pedagang-pedagang lainnya, sehingga para pedagang lain membeli barang dan rempah-rempah dalam jumlah banyak.

Merosotnya pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah Jawa Timur menyokong perkembangan Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan. Makassar muncul sebagai salah satu rute perdagangan dan membantu jaringan perdagangan, sehingga memunculkan rute baru dalam perdagangan maritim. Berbeda dengan masa Sultan Hasanuddin (1653- 1669), sistem tersebut tidak lagi digunakan karena Belanda sudah berkuasa di Makassar, dan menerapkan peraturan yang telah dibuat terutama setelah terjadinya perjanjian Bongaya pada tahun

1669 M. Belanda melakukan pembatasan pedagang. Mereka mengusir para pedagang Portugis dan Spanyol yang sudah lama menjalin hubungan dengan Makassar, dan juga membangun Stad Vlaardingen (perkampungan/kota Vlaardingen) yang memisahkan kegiatan perdagangan secara langsung.

Menurut Ansell and Gash (2007:550) Kondisi awal ini yang kemudian menjadi pemicu timbulnya keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk turut terlibat. Keinginan atau kebutuhan kolaborasi akan timbul apabila telah pernah mengalami kegagalan bersama, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesetiakawanan melalui bentuk kerjasama bersama atau kolaborasi.

Desain Institusional(Design Institutional)

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu antara Raja dengan masa Tumanurunga. Jelas bahwa pada mulanya bentuk pemerintahan di Gowa di bawah pimpinan Tumanurung adalah mengandung unsur-unsur demokrasi yang terbatas, dan kelihatan sederhana. Akan tetapi lambat laun unsur-unsur demokrasi menjadi hilang dengan sendirinya. Yang nampak menonjol ialah unsur absolute monarchie (kerajaan mutlak). Raja adalah pemerintah dan pemerintah adalah raja.

Sebagai kerajaan monarki, Gowa diatur oleh sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau sultan. Kekuasaan monarki tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sering kali melibatkan garis keturunan kerajaan yang dihormati.

Desain institusional Kerajaan Gowa mencakup struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Sultan Gowa memerintah dengan bantuan pejabat istana, seperti menteri dan penasihat, yang membentuk dewan kerajaan untuk membahas kebijakan dan masalah penting.

Selain itu, sistem hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam juga diterapkan di dalam kerajaan ini. Keberlanjutan dan stabilitas kerajaan dijaga melalui sistem pewarisan takhta yang diatur dengan cermat, dan proses ini diakui oleh masyarakat sebagai bagian integral dari struktur monarki Gowa.

Dari sumber yang ditemukan ada lembaga yang disebut Bate Salapang, tetapi lembaga itu tidak nampak seperti lembaga, karena tersebut tidak mempunyai wewenang didalam pemerintahan, tidak mempunyai wewenang membuat undang-undang atau peraturan-peraturan, tidak mempunyai wewenang menjalankan pemerintah diseluruh kerajaan, dan tidak merupakan badan penasehat.

Lalu ada Tumailalang Towa dan Tumailalang Lolo yang berugas sebagai asisten Raja. Disamping Tumailalang Towa dan Tumailalang Lolo ada seorang pejabat tinggi yang di sebut Anrong Guru Lompona Tukajannangga yaitu panglima tertinggi dari angkatan perang dari kerajaan Gowa. Suatu jabatan yang di anggap tertinggi di Gowa sesudah raja Gowa, ialah yang di sebut Pabbicara Butta (juru bicara negeri, jabatan mana dapat disamakan dengan jabatan "Mangkabumi". Pabiccara Butta juga berperan sebagai penasihat Sombaya. Ia memberikan pertimbangan kepada sombaya dalam setiap mengambil kebijakan kerajaan.

Kerajaan Gowa sendiri telah tiga puluh enam kali berganti pemimpin dalam membangkitkan pemerintahan imperium yang dibanggakan. Karaeng Tunipa'risi Kallonna (1510-1546 M) merupakan Raja Gowa dari Tamalate yang agraris ke Somba Opu. Memang tidak semua raja membawa pencapaian yang memuaskan dalam menduduki tahta, tetapi kekuasaan antara generasi para raja itulah yang dapat membuat Kerajaan Gowa masih bisa sampai di telinga kita dan dapat ditelusuri sejarahnya. Desain institusional Kerajaan Gowa mencakup struktur pemerintahan yang terorganisir

dengan baik. Sultan Gowa memerintah dengan bantuan pejabat istana, seperti menteri dan penasihat, yang membentuk dewan kerajaan untuk membahas kebijakan dan masalah penting. Selain itu, sistem hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam juga diterapkan di dalam kerajaan ini. Keberlanjutan dan stabilitas kerajaan dijaga melalui sistem pewarisan takhta yang diatur dengan cermat, dan proses ini diakui oleh masyarakat sebagai bagian integral dari struktur monarki Gowa.

Institusi keagamaan juga memegang peran penting dalam desain kerajaan Gowa. Sebagai kerajaan yang menganut agama Islam, Sultan Gowa memainkan peran ganda sebagai pemimpin politik dan agama. Masjid-masjid yang megah dibangun di wilayah kerajaan untuk memfasilitasi aktivitas keagamaan, sementara para ulama dan cendekiawan agama turut berperan dalam memberikan nasihat kepada penguasa.

Kepemimpinan Fasilitatif

Selain aspek politik, institusi keagamaan juga memegang peran penting dalam desain kerajaan Gowa. Sebagai kerajaan yang menganut agama Islam, Sultan Gowa memainkan peran ganda sebagai pemimpin politik dan agama. Masjid-masjid yang megah dibangun di wilayah kerajaan untuk memfasilitasi aktivitas keagamaan, sementara para ulama dan cendekiawan agama turut berperan dalam memberikan nasihat kepada penguasa. Desain institusional yang terintegrasi ini menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan keseimbangan antara kekuasaan politik dan otoritas agama di Kerajaan Gowa.

Kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Ansell dan Gash (2007:554-555) mensyaratkan pimpinan lembaga tata kelola kolaboratif adalah seorang pemimpin fasilitatif, yang sanggup memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama

di meja perundingan, bertatapmuka, membangun rasa saling percaya, berkomitmen, membuat rencana strategi, peta jalan, visi-misi dan tujuan bersama yang disepakati secara konsensus.

Saat memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Gowa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan kapan dia diangkat menjadi raja, yaitu saat berusia 24 tahun atau pada 1655 atau saat dia berusia 22 tahun atau pada 1653. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Malikussaid telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin.

Sultan Hasanuddin, sebagai pemimpin Kerajaan Gowa pada abad ke- 17, menunjukkan sifat kepemimpinan yang tegas dan berani dalam mempertahankan kepentingan kerajaannya. Beliau tidak segan untuk menolak kolaborasi dengan pihak lain yang dianggap dapat merugikan kerajaan dan rakyatnya. Keberanian Sultan Hasanuddin untuk mengambil sikap yang tegas memperkuat kedaulatan dan stabilitas Kerajaan Gowa di tengah tekanan dari berbagai pihak.

Sultan Hasanuddin tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok kecil, tetapi lebih memprioritaskan kesejahteraan kerajaan secara keseluruhan. Jika ada tawaran atau upaya kolaborasi yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan atau nilai-nilai kerajaan, Sultan Hasanuddin dengan tegas menolaknya untuk melindungi keutuhan dan kehormatan Kerajaan Gowa. Keputusan-keputusan ini mencerminkan keberanian dan kebijakan yang menjaga independensi serta integritas negara.

Dalam konteks kepemimpinan fasilitatif, Sultan Hasanuddin telah mengadopsi pendekatan inklusif dalam mengelola isu-isu penting bagi kerajaannya. Meskipun tidak kompromi dalam hal yang merugikan, Sultan Hasanuddin tetap membuka ruang untuk mendengar masukan dari para penasihatnya, para pemimpin istana, dan bahkan

masyarakat luas. Pendekatan ini menciptakan lingkungan partisipatif di mana kebijakan-kebijakan yang diambil lebih mencerminkan kesepakatan bersama dan rasa memiliki dari seluruh komunitas kerajaan.

Proses Kolaborasi

Ansell dan Gash (2007 :557-561) mendefinisikan 3 (tiga) tahapan proses kolaborasi yaitu problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan pelaksanaan. Proses kolaborasi yang terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang hanya bergantung pada pencapaian yang mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga memulai analisa dari dialog tatap muka (Face to Face), membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan hasil sementara.

Sultan Hasanuddin, sebagai Raja yang dikenal bijaksana dan cakap, menjalankan kebijakan yang progresif dalam proses kolaborasi dan diplomasi, terutama dalam konteks mare liberum atau perdagangan laut bebas. Salah satu pendekatan utama yang diambilnya adalah memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga untuk mendorong kerja sama dalam pengelolaan dan perlindungan perdagangan laut. Dalam mengimplementasikan prinsip mare liberum, Sultan Hasanuddin memastikan bahwa perairan di bawah kekuasaannya terbuka untuk semua negara tanpa diskriminasi, menciptakan iklim yang kondusif untuk perdagangan yang adil dan terbuka.

Makassar yang menjadi bandar transitasi bagi para pedagang dari berbagai daerah di Asia dan Eropa, mengambil kesempatan dengan menjalin hubungan dagang dengan mereka. Makassar menetapkan mare liberum (perdagangan bebas) bagi para pedagang yang mengunjungi Makassar. Dengan kata lain,

Makassar melakukan hubungan perdagangan multilateral yang berbasis maritim. Hubungan ini terus berlanjut hingga Makassar mengalami kehancuran di abad XVII.

Dalam teori collaborative governance, pentingnya partisipasi publik dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan diakui. Sultan Hasanuddin memastikan bahwa kepentingan semua pihak, baik internal maupun eksternal, dihormati dan dipertimbangkan. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat lokal, pelaku bisnis, dan negara-negara mitra perdagangan dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam perdagangan laut.

Penerapan collaborative governance juga terlihat dalam upaya Sultan Hasanuddin untuk membangun kekuatan maritim yang melibatkan kerjasama dengan negara-negara mitra dalam menjaga keamanan laut. Kolaborasi di bidang keamanan laut ini menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi perdagangan laut bebas, dengan berbagai pihak bekerja sama untuk mencegah potensi ancaman dan konflik.

Selain itu, Sultan Hasanuddin mengedepankan pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut, mencerminkan prinsip-prinsip collaborative governance yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Melalui dialog dan kerja sama lintas sektor, dia berusaha memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kebijakan Sultan Hasanuddin dalam proses kolaborasi dan diplomasi merunut pada mare liberum mencerminkan komitmen yang mendalam terhadap perdagangan laut bebas, keamanan regional, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan yang proaktif dan inklusif, Sultan Hasanuddin menjadikan perdagangan laut sebagai pilar utama bagi kemakmuran dan perkembangan wilayahnya.

Dengan demikian, kebijakan Sultan Hasanuddin dalam proses kolaborasi dan diplomasi merunut pada mare liberum secara erat terkait dengan teori collaborative governance. Pendekatannya yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kerjasama memberikan landasan kuat bagi pembentukan kebijakan dan pelaksanaan praktik perdagangan laut bebas yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Peran Dalam kesimpulan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Sultan Hasanuddin dalam proses kolaborasi dan diplomasi, terkait mare liberum atau perdagangan laut bebas, memberikan kontribusi positif dalam membentuk landasan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan collaborative governance yang diterapkan oleh Sultan Hasanuddin mencerminkan komitmen kuat terhadap kerjasama lintas sektor, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kesimpulannya, kebijakan Sultan Hasanuddin tidak hanya menciptakan landasan yang kokoh bagi perdagangan laut bebas, tetapi juga memberikan contoh bagaimana kolaborasi dan diplomasi yang bijaksana dapat membawa dampak positif bagi keamanan regional, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Studi ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya kerjasama lintas sektor dalam konteks kebijakan perdagangan laut, dengan harapan dapat menjadi rujukan bagi kebijakan serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Kurnia Ali, Faried, 2015. Teori dan Konsep Administrasi. Jakarta, PT Rajawali Pers.
Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik.

- Gramedia pustaka utama.
- Kila, D. S. (2004). Kerajaan Gowa 1669-1799. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Palogai, I. S. (2017). Kisah raja- raja Gowa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Poelinggomang, Edward L, dkk. (2004). Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1. Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sagimun. (1992) Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Ufuk Timur. Balai Pustaka
- Faried, A., Kadir, A. G., dan Faried, F. S. (2015). Filsafat dan Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pasolong, Harbani. (2019). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta.
- Haiyanta. (1997). Fungsi-Fungsi Pemerintahan. Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Departemen Dalam Negeri.
- Stoner, James A.F. dkk. (2006). Manajemen. Jakarta: PT Indeks Gramedia Grup.
- Bahri, B. (2016). Perebutan Panggadereng di Kerajaan Lokal di Jazirah Sulawesi Selatan Abad XV-XVII. *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 12(2), 97-104.
- Mutmainnah, M., Najamuddin, N., & Ridha, R. Kerajaan Gowa Pada Masa Pemerintahan I Mangarangi Daeng Manrabbia 1593-1639. *Attoriolong*, 19(1), 1-10.
- Gibson, James L. (2000). Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini, (2005). Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu? Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keating, Charles J. (2006). Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya. (Terjemahan). Yogyakarta: Kanisius.
- Muchtar, R. (2017). Bate Salapang dan Eksistensi Kerajaan Gowa (Suatu Pendekatan Antropologi Politik) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Al Muchtar, Suwarma. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Bungin, Burhan. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara